

**KAJIAN SOSIALISASI KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KELURAHAN SETIANAGARA, KECAMATAN
CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT**

***STUDY ON THE SOCIALIZATION OF SUSTAINABLE AGRICULTURE LAND
POLICIES IN SETIANEGARA VILLAGE, CIBEUREUM DISTRICT,
TASIKMALAYA CITY, WEST JAVA PROVINCE***

Yudianto Permana¹, Trisna Insan Noor²

¹Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

²Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21

*Email: yudiantopermana27@gmail.com

(Diterima 16-03-2022; Disetujui 18-05-2022)

ABSTRAK

Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum adalah satu dari sekian banyak daerah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012, kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan oleh pemerintah setempat, namun peningkatan alih fungsi lahan masih terus terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana sosialisasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, serta menganalisis factor-faktor pendukung dan penghambat terwujudnya tujuan sosialisasi. Desain penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode wawancara dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan dari mulai tingkat kota sampai tingkat kecamatan yang dihadiri oleh para petani, yang menjadi sosialisator yakni Dinas Pertanian dan Tim perumus LP2B dengan kelompok sasaran petani pemilik lahan sawah, dengan metode presentasi dan pamflet, yang menjadi tujuannya yaitu sebagai informasi penetapan lahan LP2B beserta kesepakatan dengan petani. Faktor pendorong kegiatan sosialisasi adalah kerukurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan lahan, sedangkan faktor penghambat tercapainya tujuan sosialisasi adalah dalam pelaksanaannya kelompok sasaran kurang tepat.

Kata kunci: Sosialisasi, Kebijakan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Setianegara

ABSTRACT

Setianegara Village, Cibereum District is one of the areas that has been designated as Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) in Regional Regulation No.4 of 2012, socialization activities have been carried out by the local government, but the increase in land conversion is still happening. This study aims to determine how the socialization of sustainable food agricultural land policies in Setianegara Village, Cibereum District, and to analyze the supporting and inhibiting factors for the realization of the socialization objectives. This research design is qualitative with interview and case study methods. The results of the analysis show that the socialization activities have been carried out from the city level to the sub-district level which was attended by farmers, who became the socializers, namely the Agricultural Service and the LP2B formulating team with the target group of farmers who own rice fields, with presentation methods and pamphlets, which are the objectives, namely as information LP2B land determination and agreement with

farmers. The driving factor for the socialization activities was the lack of water availability for land needs, while the inhibiting factor for the achievement of the objectives of the socialization was inadequate implementation of the target group.

Keywords: Socialization, Policy, Sustainable Food Agriculture, Setianegara

PENDAHULUAN

Mendorong segala bentuk pembangunan dalam kemandirian dan ketahanan pangan adalah satu dari sekian aspek penting guna memenuhi tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat dan pemenuhan hak asasi manusia atas hak pemenuhan pangan, faktor pendukung dalam memenuhi tujuan tersebut yaitu cukupnya lahan pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap orang, lahan pertanian adalah bagian bumi yang menjadi anugrah dari Tuhan, dikuasai dan diatur oleh negara serta dipergunakan manfaatnya semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat sebagaimana aturan yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) tahun 1945. Menurut Mubyarto (1989) lahan adalah satu dari sekian faktor produksi terpenting yang dapat mempengaruhi hasil dari produktivitas pertanian yang juga didukung faktor produksi lainnya. dalam jangka waktu yang sangat panjang produksi pertanian akan terjaga apabila lahan yang tersedia tetap ada serta masih ada dukungan dengan meningkatkan faktor-faktor

produksi sehingga aspek kebutuhan pangan dalam jangka panjang dapat terpenuhi, akan tetapi dengan perkembangan jaman saat ini terjadi penambahan penduduk, pertumbuhan industri yang semakin menjadi menyebabkan terjadi penurunan jumlah lahan pertanian di Indonesia, Badan Statistika di Indonesia (BPS) menyatakan bahwasannya luasan baku lahan pertanian sawah terus-menerus mengalami penurunan. Tercatat bahwa lahan-lahan baku untuk persawahan pada tahun 2018, mengalami penurunan lebih dari setengah juta hektar, yaitu menjadi 7,1 juta hektar, yang awalnya masih 7,75 juta hektar pada tahun 2017. Adanya penurunan tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang semakin banyak diikuti dengan maraknya pembangunan akan kebutuhan lahan diluar sektor pertanian, dengan semakin bertambahnya kebutuhan akan lahan non pertanian tersebut, diperlukan andil pemerintah untuk membuat kebijakan yang fokus terhadap pengendalian laju konversi lahan. Secara jangka panjang apabila terjadi penurunan luas lahan pertanian akan mengancam ketahanan

pangan nasional. Pasandaran (2006) berpendapat bahwa ancaman terhadap ketahanan pangan nasional adalah terjadinya konversi lahan sawah yang dampaknya bersifat permanen karena sangatlah kecil kemungkinan lahan tersebut akan menjadi lahan persawahan kembali. Di pulau Jawa sendiri peningkatan konversi lahan pertanian sawah juga masih terjadi, khususnya di Jawa Barat yang memiliki luas lahan baku sawah ketiga terbesar, sementara di posisi pertama sebagai pemilik lahan baku sawah terbesar di Pulau Jawa adalah Jawa timur, disusul oleh Jawa Tengah (BPS, 2017). Tingginya laju konversi/alih fungsi lahan-lahan pertanian sawah di pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Barat disebabkan antara lain karena pesatnya pembangunan di sektor industri, perumahan, dan infrastruktur.

Kota Tasikmalaya, salah satu kota di Jawa Barat dengan luas lahan sawah sebesar 5.962 hektar pada tahun 2016 (BPS, 2018). Kota Tasikmalaya juga menempati posisi ke dua setelah Kabupaten Indramayu mengenai tingginya konversi lahan, sebanyak 1.553 Hektar lahan terkonversi dihitung dari tahun 2014–2016. (BPS, 2017).

Sebenarnya pemerintah telah mengupayakan pengendalian terhadap laju konversi lahan-lahan pertanian guna menjaga ketahanan akan pangan dengan adanya UU No. 41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang perlindungan lahan - lahan pertanian berkelanjutan, yang bertujuan untuk dapat melindungi serta menjaga kawasan, kepemilikan, serta menjaga ketersediaan lahan-lahan pertanian untuk kebutuhan pangan berkelanjutan, selain itu Kota Tasikmalaya sendiri juga telah membuat sebuah peraturan yang diperuntukan untuk menjaga lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 yang juga diterintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang diperuntukan terlebih dahulu untuk empat wilayah kecamatan yaitu Purbaratu, Cibeureum, Mangkubumi, dan Kawalu.

Diantara kecamatan lain yang sudah ditetapkan Kecamatan Cibeureum merupakan areal yang paling luas lahan sawahnya, sudah seyogyanya kebijakan LP2B yang seharusnya menjadi pegangan dalam mengurangi alih fungsi lahan, akan tetapi pada tahun 2013-2016 Kecamatan Cibeureum tetap mengalami alih fungsi

sebagian lahan sawahnya yaitu seluas 5 hektar.

Tabel 3. Perkembangan luas lahan baku sawah kecamatan LP2B Kota Tasikmalaya tahun 2013-2016 (Ha)

Kecamatan	2014	2015	2016	Luas Konversi (Ha)
Kawalu	1.244	1.244	1.244	-
Cibeureum	763,5	763,5	758,5	5
Mangkubumi	1.134	1.134	1.132	2
Purbaratu	499	499	494	5

Sumber: Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya, 2017
 Pemerintah Kota Tasikmalaya

Konversi lahan yang terjadi dikarenakan areal wilayah yang sangat berdekatan dengan pusat kotanya, dan ada juga rencana bahwa Kecamatan Cibeureum akan dibangun menjadi pusat pendidikan Kota Tasikmalaya, hal ini berdampak pada pembangunan di sektor perumahan (Martunisa, 2018), oleh karena itu dalam upaya menurunkan tingkat konversi lahan-lahan pertanian dikeluarkanlah langkah pengendaliannya oleh pemerintah, diantaranya yaitu dengan melakukan sosialisasi kebijakan LP2B yang dikeluarkan dari Dinas Tata Ruang Tata Wilayah.

Sosialisasi merupakan satu dari berbagai aspek penting pada tahapan-tahapan sebuah kebijakan, karena kebijakan akan dapat bermanfaat bila di sosialisasikan khususnya demi mencegah terjadi konversi lahan. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan adalah langkah efektif dalam meningkatkan dan

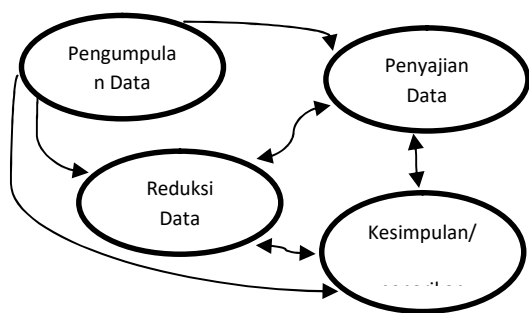
menjaga budaya hukum dalam tatanan sosial di Indonesia, karena segala sesuatunya diatur berdasarkan hukum, bukan hanya berdasar pada kekuasaan semata.

Namun demikian implementasi di lapangan belum sesuai harapan, didapatkan bahwa masih banyak yang belum memahami, tidak sedikit juga yang belum mengetahui dan bahkan para petani baru mendengar lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini menjadi perhatian penting dikarenakan aspek dalam pelaksanaan kebijakan yakni sosialisasi kebijakan tidak sesuai dengan tujuan yang tercermin dari masih banyaknya petani yang tidak mengetahui tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan ini. Berdasarkan uraian sebelumnya maka fokus penelitian ini yaitu mengenai kajian sosialisasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni menemukan serta mencari makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, dan ditampakan dalam bentuk

penyajian data kualitatif, baik berupa kumpulan gambar, kata, maupun kejadian atau dalam *natural setting* (A. Muri Yusuf, 2017). Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah kajian sosialisasi kebijakan LP2B. Tempat penelitian ini berlokasi di Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Penentuan tempat dilakukan secara sengaja (purposive). Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari informan pihak terkait dan sumber pustaka. Teknik dan Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992).



Gambar 1. Model Interaktif Miles dan Huberman

Tahapan tahapan model interaktif Miles dan Huberman (1992) yaitu pengumpulan data dilakukan beberapa tahap yaitu sebelum penelitian, kemudian saat penelitian hingga akhir penelitian. Pengumpulan data yang digunakan

peneliti adalah dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data adalah proses pemulihan, dan pemusatan perhatian kemudian penyederhanaan dan transformasi dari data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan aspek yang diteliti. Selanjutnya penyajiann data di sini merupakan kumpulan berbagai informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Penyajian data yang sangat sering digunakan yaitu berupa teks naratif dengan tujuan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan pengambilan keputusan, terakhir penarikan kesimpulan langkah ke empat ini, dimulai dengan mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, serta alur sebab-akibat dan proposisinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Setianagara terbentuk pada tahun 1984 yang merupakan Pemekaran dari Desa Setiaratu dan sejak tahun 2003 berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya No. 30 Tahun 2003 berubah status menjadi Kelurahan. Luas wilayah Kelurahan Setianagara yaitu 131,50 Ha.

Jarak Kelurahan Tasikmalaya dengan pusat pemerintahan Cibeureum sejauh 2 Km sedangkan jarak ke pusat pemerintahan kota sejauh 8 km.

Sebanyak 4.697 penduduk berada di Kelurahan Setianegara. Diantaranya laki-laki sebanyak 49,8 % atau sebesar 2.340 orang sedangkan penduduk perempuan sebesar 50,2 % atau berjumlah 2.357 orang. Berdasarkan penghitungan sex ratio didapatkan sex ratio nya adalah 99 yang artinya setiap 100 orang penduduk berjenis kelamin perempuan, ada 99 orang penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Di Kelurahan Setianegara mayoritas petani mengusahakan lahan pertaniannya untuk usahatani padi sawah, luas lahan pada tahun 2018 sebesar 50 Ha, petani Kelurahan Setianegara terdiri dari petani pemilik, pemilik penggarap, petani sewa, dan petani penggarap yang berjumlah 282 petani. Pada saat musim tanam padi akan dilakukan apabila ketersediaan air cukup dan biasanya terjadi pada saat penghujan, hal ini dikarenakan pasokan air sedang banyak, saat pasokan air dianggap kurang oleh petani atau pada saat musim kemarau melanda maka para petani setempat memanfaatkan lahan pertanian dan digunakan untuk usahatani palawija dan

sayuran. Irigasi di Kelurahan Setianegara dalam pemenuhan pasokan air ialah dengan irigasi sistem teknis, yang berasal dari Sungai Cimuluh dan Sungai Ciherang.

Kajian Sosialisasi Kebijakan LP2B

Sosialisasi kebijakan LP2B merupakan kegiatan dan bentuk upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 35 UU No. 41 Tahun 2009. Suksesnya kegiatan sosialisasi menurut Dian Herdiana (2018) harus adanya kejelasan peran sosialisator, kejelasan isi/substansi dan metode sosialisasi, kejelasan kelompok sasaran, dan kejelasan output atau tujuan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dimulai dari tingkat tertinggi dilingkungan pembuat peraturan. Kota Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang didalamnya memuat pembagian wilayah untuk kegiatan pertanian khususnya untuk lahan pertanian berkelanjutan. Maka dari itu untuk menjaga tersedianya lahan tersebut pemerintah melakukan sosialisasi.

Sosialisasi Tingkat Kota

Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya untuk menjamin kecukupan penyediaan pangan sekaligus

pengimplementasian kebijakan UU No.41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, maka Kota Tasikmalaya menetapkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan adanya peraturan tersebut yang menjadi acuan dinas pertanian dan pangan untuk melakukan sosialisasi kepada unsur pemerintahan dibawahnya.

Dinas Pertanian dan pangan yang dalam hal ini bertanggung jawab sebagai sosialisator dalam pelaksanaan LP2B melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan yang wilayahnya termasuk ke dalam LP2B untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Dalam hal ini upaya yang dilakukannya yaitu melaksanakan sosialisasi kepada pihak Kecamatan, Kelurahan dan perwakilan kelompok tani mengenai perencanaan implementasi LP2B, kegiatan sosialisasi dilakukan di gedung BAPPEDA Kota Tasikmalaya, tujuan sosialisasi ini sebagai tahapan awal untuk menginformasikan kepada Kecamatan tentang rencana peimplementasian sekaligus pemetaan wilayah yang menjadi LP2B, dengan disampaikan nya hal tersebut agar di teruskan kepada unsur pemerintahan selanjutnya yakni pihak Kelurahan dan

pihak terkait lainnya seperti Petani dan Kelompok Tani. Sarana yang digunakan Dinas Pertanian dan Pangan dalam sosialisasi berupa pemaparan presentasi kepada massa yang hadir selain itu pembuatan brosur yang memuat informasi dan juga pemberian ex-banner informasi seputar LP2B yang nantinya agar disimpan di kantor setiap kecamatan.

Berdasarkan analisis yang diungkapkan oleh Dian Herdiana (2018) tentang suksesnya kegiatan sosialisasi didapatkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan terlaksana sesuai tujuan, serta dapat dilihat indikator yang tercapai yakni adanya sosialisator yaitu Dinas Pertanian dan Pangan, adanya kejelasan substansi dan metode sosialisasi yang digunakan, selanjutnya kelompok sasaran yang dituju sudah sesuai dengan substansi yang akan diberikan, serta kejelasan hasil yang telah tercapai dalam terselenggaranya sosialisasi tersebut.

Sosialisasi Tingkat Kecamatan

Tujuan dari diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut guna menginformasikan kepada para petani sebagai objek yang sangat berpengaruh dalam suksesnya kebijakan ini. Hal yang disampaikan berupa urgensi LP2B yakni

sebagai sebagai upaya untuk menjamin kecukupan penyediaan pangan secara nasional dan upaya keseriusan dalam melakukan perbaikan sistem produksi pangan. Informasi yang disampaikan juga berupa data statistik penurunan lahan yang telah dialih fungsikan yang harapannya agar menambah ketertarikan petani dalam menarik simpati. Selain itu penyampaian wilayah yang termasuk kedalam wilayah penetapan LP2B kepada petani yang hadir agar dicermati apakah wilayah nya termasuk atau tidak, yang selanjutnya akan dilakukan penetapan bersama komitmen pemilik lahan agar tidak boleh dialih fungsikan sampai dengan rencana tataruang yang secara periodik melakukan peninjauan kembali.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan presentasi oleh pihak Dinas dan Tim LP2B kepada massa yang hadir, selain itu upaya lainnya juga digunakan kuisisioner respon akan persetujuan kebijakan ini, dalam kegiatan sosialisasi tersebut menurut Suprianto selaku tim leader perumus LP2B sekaligus sosialisator menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi di Kecamatan rata-rata dihadiri oleh lebih dari 70 Petani tiap kecamatan.

Sosialisasi yang dilakukan di tiap Kecamatan pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan dan target kelompok

sasaran sebagaimana yang diungkapkan oleh Dian Herdiana (2018) bahwa kejelasan kelompok sasaran merupakan salah satu sukses tujuan sosialisasi, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan sosialisasi yang terjadi di Kecamatan Cibeureum audience yang hadir merupakan petani penggarap yang tidak mempunyai kepemilikan lahan, sedangkan objek dalam sosialisasi ini merupakan petani atau masyarakat yang mempunyai lahan.

Sosialisasi Tingkat Kelurahan

Berdasarkan penelitian kegiatan sosialisasi mengenai LP2B di tingkat Kelurahan ditiadakan karena sudah diwakilkan di tingkat Kecamatan, akan tetapi pihak kelurahan terus melakukan himbuan kepada masyarakat agar terus koordinasi terkait pendirian bangunan yang akan dilakukan agar memudahkan penyesuaian data lahan yang telah terkonversi, namun belum optimal dalam pelaksanaannya, karena masih minimnya kesadaran masyarakat untuk dapat melaporkan hal tersebut, sehingga imbasnya lahan semakin banyak yang dialihfungsikan.

Sosialisasi Tingkat Petani/Kelompok

Informan dalam sosialisasi di tingkat petani atau kelompok tani adalah perwakilan dari setiap kelompok tani di

Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, petani yang dimaksud merupakan petani pemilik maupun penggarap yang aktif dalam kelompok tani. Hasil dilapangan didapatkan bahwa ternyata masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya kegiatan sosialisasi LP2B, hal tersebut dikarenakan tidak adanya informasi dari pemerintah atau penyelenggara kegiatan.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong merupakan suatu hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha, dan upaya lainnya, sedangkan faktor penghambat merupakan suatu hal atau faktor yang sifatnya menghambat jalannya kegiatan dan bersifat menggagalkan suatu hal. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam cangkupan Kota Tasikmalaya dalam rangka sebagai langkah untuk pengimplementasian kebijakan lahan pertanian berkelanjutan ternyata mempunyai beberapa faktor pendorong dan penghambat. Menurut Mulyono (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya faktor kesadaran aparatur, faktor aturan, faktor organisasi, faktor kemampuan dan keterampilan, faktor sarana dan prasarana.

Faktor Pendorong

1. Kebijakan LP2B Nasional

Pengimplementasian penetapan lahan berkelanjutan dikarenakan adanya kebijakan yang telah mengatur perihal tersebut, UU No. 41 Tahun 2009 menjadi rujukan dasar dalam hal kebijakan secara Nasional, didalamnya mengamanatkan untuk ditindaklanjuti implementasi kebijakan ini ke tahap daerah.

2. Penetapan RTRW Tasikmalaya

Setelah adanya kebijakan secara nasional maka Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan rencana tata ruang wilayah yang didalamnya mengatur semua penggunaan lahan beserta peruntukannya, tak terkecuali pengelolaan untuk bidang pertanian, khususnya terkait lahan pangan.

3. Berkurangnya Sumber Air

Dengan bertumbuhnya penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal semakin tinggi yang imbasnya kepada pengalihfungsian lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian di alihkan ke pembangunan rumah atau industri, dan imbasnya terbatasnya air yang tersedia karena ketidakseimbangan ekosistem.

Faktor Penghambat

1. Kelompok Sasaran Tidak Tepat

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak tepat sasaran, yang menjadi objeknya adalah petani pemilik lahan karena akan berwenang langsung memutuskan masa depan lahan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata para pemilik lahan tidak bisa menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan, alhasil yang bisa menghadirinya yaitu mayoritas petani penggarap.

2. Antusiasme Petani dalam Program LP2B

Dalam kebijakan LP2B terdapat keuntungan yang didapatkan bagi pemilik lahan untuk menunjang kegiatan berproduksi, namun hal tersebut tidak menarik bagi petani di Kelurahan Setianegara karena keuntungan yang didapatkan tidak seberapa dibandingkan dengan kebutuhan untuk sehari-hari.

3. Pendataan Kepemilikan Lahan Belum Efektif

Banyaknya petani yang mengalihfungsikan lahan untuk dijadikan tempat tinggal dan kebutuhan pribadi lainnya dengan tanpa koordinasi dengan pemerintahan setempat mPendataan kepemilikan lahan di kelurahan Setianegara masih belum maksimal, dan sampai saat ini masih terbatas sebagai

informasi penuturan dari petani, belum pengukuran secara langsung di lapangan. Ini jadi penghambat terwujudnya tujuan sosialisasi karena untuk pendataan kepemilikan lahan harus yang pasti dan akurat. enjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tujuan sosialisasi. Dengan tidak puasnya keuntungan yang didapatkan ditambah dengan tidak ada pilihan lain akhirnya petani mengambil langkah tersebut, sebagaimana penuturan kepala kelurahan Setianegara yang ternyata banyak warganya yang melakukan alih fungsi untuk kebutuhan pribadi.

Menjadi permasalahan manakala proses pendataan tidak dilakukan secara spesifik dan berkala, hal ini lah yang terjadi di lapangan, sehingga keakuratan data tidak bisa terjamin, ditambah banyaknya petani mengalihfungsikan lahan untuk dijadikan tempat tinggal dengan tanpa koordinasi dengan pemerintahan setempat.

4. Alih Fungsi Lahan Karena Kebutuhan Pribadi

Banyaknya petani yang mengalihfungsikan lahan untuk dijadikan tempat tinggal dan kebutuhan pribadi lainnya dengan tanpa koordinasi dengan pemerintahan setempat menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tujuan

sosialisasi. Dengan tidak puasnya keuntungan yang didapatkan ditambah dengan tidak ada pilihan lain akhirnya petani mengambil langkah tersebut, sebagaimana penuturan kepala kelurahan Setianegara yang ternyata banyak warganya yang melakukan alih fungsi untuk kebutuhan pribadi.

5. Kepemilikan Lahan Bukan Warga Lokal

Sasaran dalam sosialisasi adalah petani pemilik dan penggarap, petani pemilik untuk menjadi penentu keputusan penggunaan lahan sedangkan petani penggarap sebagai bahan pertimbangan petani pemilik memanfaatkan lahannya. Akan tetapi, di Kelurahan Setianegara mayoritas kepemilikan lahan tidak dimiliki oleh masyarakat sekitar, para pemilik lahan umumnya berada di luar Kota Tasikmalaya dan bukan berprofesi sebagai petani, sebagai mana penuturan dari *team leader* LP2B.

6. Belum Meratanya Informasi LP2B

Pemerataan informasi belum sepenuhnya terjalin di kelurahan setianegara, dibuktikan dengan survei yang dilakukan kepada petani setempat yang banyak belum mengetahui adanya pengenalan atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat mengenai

kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sosialisasi kebijakan lahan pertanian berkelanjutan dimulai dari sosialisasi tingkat kota, selanjutnya sosialisasi tingkat kecamatan, namun tidak ada sosialisasi tingkat kelurahan.

Sosialisator yang terlibat dalam sosialisasi kebijakan yakni Dinas Pertanian dan Tim perumus LP2B dengan kelompok sasaran petani pemilik lahan sawah, dengan metode presentasi, dan pamflet, yang menjadi tujuannya yaitu sebagai informasi penetapan lahan LP2B beserta kesepakatan dengan petani.

Faktor pendukung yang dominan terselenggaranya sosialisasi adalah dikarenakan berkurangnya sumber air di sekitar, sedangkan faktor penghambat tercapainya tujuan sosialisasi adalah kelompok sasaran kurang tepat sehingga tidak tercapai tujuan sosialisasi

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diusulkan yaitu Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan dapat membuat sistematis penyampaian informasi

sesuai dengan target kelompok sasaran, sehingga output bisa tercapai dan tidak terjadi salah sasaran.

Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan dapat memberikan penawaran keuntungan yang mampu menarik antusiasme petani dalam implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan lebih mengikutsertakan peran masyarakat dan melakukan kerjasama secara pentahelix yang meliputi akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintahan, dan media.

DAFTAR PUSTAKA

- A Muri Yusuf. 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian. Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group
- Horton Paul B, Hunt. (1996). Sosiologi. Jilid II. Jakarta: Erlangga
- Herdiana, Dian. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. STIA Cimahi. Jurnal Ilmiah Wawasan Akademik
- Martunisa, Prilly. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi lahan di Kelurahan Kersaneraga, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Jurnal Rekayasa Hijau. Vol 2: (1)
- Mulyana. Octavianti. 2016. Efektivitas Penggunaan Media Dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Human Trafficking Di Kabupaten Indramayu. Fikom Unpad
- Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES Metti.
- Paramita. 2015. Efektifitas Sosialisasi Asuransi Syariah Pt. Pru Syariah Bogor. Jurnal Syarikah Vol 1 No.1
- Pasandaran, Effendi. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian 25. No. 4
- Sudirman, s. 2012. Valuasi Ekonomi Dampak Konversi Lahan di Pinggiran. Yogyakarta. Agrika. Vo. 6(1): 103-125
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Vembriarto. 2007. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Gramedia.